



## SOSIALISASI KONSTRUKSI SOSIAL KEARAH INKLUSIF PADA KEPALA SEKOLAH SD SE KECAMATAN BANTAENG

<sup>1</sup>Awayundu Said\*, <sup>2</sup>Mustafa, <sup>3</sup>Fizal, <sup>4</sup>Nurazizah Rahmi R

<sup>1234</sup>Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

Email: awayundusaid@unm.ac.id<sup>1</sup> Mustafa@unm.ac.id<sup>2</sup> faizal@unm.ac.id<sup>3</sup> nurazizah.rahmi@unm.ac.id<sup>4</sup>

\*Corresponding author: awayundusaid@unm.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Sosialisasi Konstruksi Sosial Kearah Inklusif yang dilaksanakan di Kecamatan Bantaeng dihadirkan sebagai upaya mentransformasi paradigma Kepala Sekolah SD dari Model Medis Disabilitas menjadi Model Sosial Disabilitas. Permasalahan utama adalah kesenjangan antara kebijakan dan praktik, ditandai rendahnya pemahaman manajerial dan budaya sekolah yang belum inklusif. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman kompetensi praktis. Metode pelaksanaan kegiatan dikemas dalam bentuk *workshop* dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dari kategori 'Kurang' menjadi 'Baik' dan kompetensi manajerial dari Cukup menjadi Sangat Baik, membuktikan keberhasilan penggeseran konstruksi sosial menuju praktik inklusif.

**Kata Kunci:** Konstruksi Sosial, Pendidikan Inklusif, Kepala Sekolah, Model Sosial Disabilitas.

### ABTRACT

*The Social Construction Socialization Towards Inclusion conducted in Bantaeng District was presented as an effort to transform the paradigm of Elementary School Principals from the Medical Model of Disability to the Social Model of Disability. The main problem was the gap between policy and practice, marked by low managerial understanding and a school culture that was not yet inclusive. This activity aimed to improve understanding of practical competencies. The implementation method was packaged in the form of workshops and mentoring. The results of this activity showed a significant increase from the category of 'Poor' to 'Good' and managerial competency from Sufficient to Very Good, proving the success of shifting social construction towards inclusive practices.*

**Keywords:** Social Construction, Inclusive Education, Principals, Social Model of Disability.

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan transformatif yang bertujuan menghilangkan hambatan agar setiap siswa dapat berpartisipasi penuh dalam pendidikan berkualitas. Di Indonesia, komitmen ini diperkuat melalui regulasi. Namun, pada kenyataannya, implementasi di lapangan masih menghadapi kesenjangan signifikan antara kebijakan dan praktik.

Permasalahan utama yang teridentifikasi di Sekolah Dasar Kecamatan Bantaeng adalah dominasi paradigma lama, di mana Kepala Sekolah cenderung memahami inklusi sebagai kewajiban penempatan fisik siswa, sesuai dengan Model Medis Disabilitas. Hal ini menyebabkan kegagalan dalam menyediakan layanan yang sesuai, seperti penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang efektif. Fenomena ini menunjukkan adanya konstruksi sosial yang belum inklusif, menciptakan hambatan struktural dan budaya di lingkungan sekolah. Padahal, inklusi sejati menuntut perubahan pada sistem dan lingkungan sekolah agar memenuhi kebutuhan semua peserta didik, sejalan dengan Model Sosial Disabilitas.

Atas dasar hal tersebut, program pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan utama mentransformasi konstruksi sosial Kepala Sekolah agar memahami inklusi sebagai transformasi sistem. Selain itu, program bertujuan meningkatkan kompetensi manajerial Kepala Sekolah dalam mengelola program inklusif, termasuk alokasi dana dan penyusunan Rencana Aksi Sekolah Inklusif (RASI). Peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan terciptanya budaya sekolah yang antidiskriminasi menjadi muaranya.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang kami gunakan dalam program "Sosialisasi Konstruksi Sosial Sekolah Kearah Inklusif" ini dirancang bukan sekadar untuk memberikan ceramah, tetapi untuk memicu perubahan paradigma dan aksi nyata di tingkat Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Bantaeng. Kami menerapkan pendekatan pelatihan yang bersifat Partisipatif dan Berorientasi Aksi, dibagi menjadi tiga tahap utama.

### 2.1 Tahap Diagnosis dan Perancangan (Memahami Masalah)

Sebelum memberikan solusi, kami harus memastikan bahwa solusi itu sesuai dengan kebutuhan mitra.

- a. Analisis Kebutuhan Awal: Langkah pertama adalah mendiagnosis kondisi nyata. Tim pengabdian melakukan wawancara mendalam dengan perwakilan Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan. Tujuannya untuk memetakan sejauh mana pemahaman mereka tentang inklusi dan hambatan manajerial apa yang paling mereka rasakan. Informasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa materi yang disajikan (terutama tentang PPI, dana BOS, dan budaya sekolah) relevan dan kontekstual dengan situasi di Bantaeng.
- b. Perancangan Modul: Berdasarkan hasil diagnosis, kami menyusun modul pelatihan yang tidak kaku. Modul ini berfokus pada transformasi *mindset* (Konstruksi Sosial) dan dilengkapi dengan studi kasus serta lembar kerja praktis, seperti *template* untuk menyusun Rencana Aksi Sekolah Inklusif (RASI).

### 2.2 Tahap Pelaksanaan

Perubahan konstruksi sosial diupayakan. Kami menggunakan metode yang mendorong refleksi dan kolaborasi.

- a. Sosialisasi dan Diskusi Filosofis: Kami tidak hanya menyajikan materi, tetapi menggunakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Kepala Sekolah diajak berdiskusi tentang perbedaan mendasar antara Model Medis dan Model Sosial Disabilitas. Mereka didorong untuk merefleksikan praktik di sekolah masing-masing dan secara kolektif mengidentifikasi bagaimana pandangan (konstruksi sosial) yang lama telah menjadi penghalang bagi ABK. Proses ini bertujuan untuk secara halus menggeser paradigma mereka.
- b. Workshop Manajemen Praktis: Setelah *mindset* diubah, kami memberikan alatnya. Metode yang digunakan adalah Simulasi dan *Role-Play*. Kepala Sekolah dilatih secara langsung cara melakukan asesmen sederhana ABK, bagaimana menyusun PPI yang realistis, dan yang paling penting, bagaimana cara yang benar mengalokasikan anggaran BOS untuk mendukung program inklusi tanpa melanggar aturan.
- c. Pelatihan Kepemimpinan Budaya: Kepala Sekolah dilatih untuk menjadi "pemimpin budaya" melalui sesi *Brainstorming* dan *Sharing Best Practices*. Mereka merumuskan strategi bersama tentang bagaimana menciptakan budaya anti-*bullying*, melibatkan orang tua ABK sebagai mitra aktif, dan memastikan guru kelas termotivasi untuk belajar diferensiasi.

### 2.3 Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Keberhasilan program diukur dari seberapa jauh perubahan yang terjadi berkelanjutan di sekolah.

- a. Pendampingan Penyusunan RASI: Ini adalah langkah paling penting. Setiap Kepala Sekolah didampingi secara personal untuk menyusun Rencana Aksi Sekolah Inklusif (RASI). RASI ini adalah *blueprint* perubahan mereka, yang memuat target spesifik (misalnya, membuat 10 PPI dalam 3 bulan ke depan). Pendampingan ini memastikan bahwa pengetahuan yang diterima langsung diterjemahkan menjadi komitmen aksi yang terukur (tujuan d).
- b. Monitoring dan Evaluasi: Untuk mengukur efektivitas, kami menggunakan instrumen Pre-Test dan Post-Test sebelum dan sesudah *workshop* untuk mengukur peningkatan pemahaman konseptual dan manajerial. Selain itu, tim akan melakukan kunjungan tindak

lanjut atau sesi konsultasi *online* setelah program, untuk memonitor implementasi RASI dan memberikan solusi atas kendala nyata yang ditemukan di lapangan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan di Kecamatan Bantaeng dengan melibatkan Kepala Sekolah Dasar sebagai mitra sasaran. Kegiatan Sosialisasi Konstruksi Sosial Sekolah Kearah Inklusif telah dilaksanakan dengan lancar dan kondusif. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hal ini terlihat dari kehadiran peserta yang mencapai 100%, partisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab, serta keseriusan peserta dalam mengikuti materi yang disampaikan. Ruangan yang digunakan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, termasuk proyektor, layar presentasi, sound system, dan meja kursi yang nyaman, sehingga mendukung penyampaian materi dan interaksi yang efektif.

Materi sosialisasi yang disampaikan mencakup pengenalan program pengabdian masyarakat, konsep dan prinsip dasar konstruksi sosial, analisis peserta didik di SLB pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan utama mentransformasi konstruksi sosial Kepala Sekolah agar memahami inklusi sebagai transformasi sistem. Selain itu, program bertujuan meningkatkan kompetensi manajerial Kepala Sekolah dalam mengelola program inklusif,



Gambar 1. Proses Sosialisasi

#### 3.2 Hasil Pre-test dan Post-test

Efektivitas intervensi diukur melalui instrumen *Pre-test* dan *Post-test* serta bukti luaran kegiatan. Berikut adalah paparan data hasil kegiatan:

- a. Data Peningkatan Pemahaman Filosofis (Konstruksi Sosial) Berdasarkan analisis data *pre-test*, pemahaman awal mitra mengenai filosofi pendidikan inklusif berada pada kategori rendah. Namun, setelah dilakukan sosialisasi dan *workshop* intensif, data *post-test* menunjukkan kenaikan kategori secara signifikan. Kondisi Awal (*Pre-test*): Pemahaman filosofis berada pada kategori kualitatif 'Kurang' dan Kondisi Akhir (*Post-test*): Pemahaman meningkat menjadi kategori kualitatif 'Baik'.
- b. Data Peningkatan Kompetensi Manajerial Selain aspek kognitif, pengukuran juga dilakukan terhadap kemampuan teknis operasional (manajerial), yang mencakup penyusunan PPI dan perencanaan anggaran. Kondisi Awal (*Pre-test*): Kompetensi manajerial mitra berada pada kategori 'Cukup' dan Kondisi Akhir (*Post-test*): Kompetensi meningkat tajam menjadi kategori 'Sangat Baik'.

No	Aspek Penilaian	Nilai Rata-rata Pre-Test (Awal)	Nilai Rata-rata Post-Test (Akhir)	Keterangan Peningkatan
<b>Pemahaman Filosofis</b>				
1	Konstruksi Sosial dan Paradigma Inklusi	Kurang	Baik	Signifikan Terjadi pergeseran paradigma dari Model Medis ke Model Sosial
<b>Kompetensi Manajerial</b>				
2	Penyusunan PPI, RASI, & Anggaran	Cukup	Sangat Baik	Sangat Signifikan Peningkatan keterampilan teknis operasional

### 3.3 Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung sangat dinamis dan reflektif. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam menggali implementasi Konstruksi Sosial menuju sekolah inklusif. Fokus pertanyaan bergeser dari sekadar teknis pengajaran menjadi isu fundamental dan manajerial, seperti strategi mengubah paradigma guru yang masih terpaku pada Model Medis Disabilitas, solusi manajerial untuk mengatasi ketiadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI), serta keraguan mengenai legalitas alokasi dana BOS untuk mendukung kebutuhan program inklusi di tengah keterbatasan anggaran

Tim pengabdian memberikan respons komprehensif dengan menekankan prinsip Model Sosial Disabilitas, bahwa fokus utama sekolah bukanlah 'menyembuhkan' karakteristik anak, melainkan menghilangkan hambatan sistem dan lingkungan yang membatasi partisipasi mereka. Tim juga memberikan penguatan bahwa keterbatasan SDM dapat diatasi dengan memberdayakan guru kelas untuk menyusun PPI sebagai 'kontrak belajar' yang fleksibel, serta menegaskan legitimasi penggunaan anggaran sekolah untuk menciptakan budaya inklusif. Interaksi ini menegaskan transformasi peserta dari penerima kebijakan yang pasif menjadi agen perubahan yang siap mengimplementasikan Rencana Aksi Sekolah Inklusif (RASI)



Gambar 2 Diskusi dan Tanya Jawab

### 3.4 Hasil pelatihan analisis dan tujuan pembelajaran

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sosialisasi konstruksi sosial dan pelatihan teknis manajerial telah menghasilkan dampak yang substansial terhadap kapasitas Kepala Sekolah SD di Kecamatan Bantaeng. Evaluasi keberhasilan program ditinjau dari dua dimensi utama: transformasi paradigma (konstruksi sosial) dan peningkatan kompetensi teknis dalam merumuskan tujuan pembelajaran adaptif (penyusunan PPI).

#### 1. Transformasi Konstruksi Sosial: Pergeseran dari Model Medis ke Model Sosial

Hasil analisis *pre-test* dan *post-test* menunjukkan terjadinya rekonstruksi kognitif yang signifikan di kalangan mitra. Sebelum intervensi, dominasi paradigma Model Medis Disabilitas sangat kuat, di mana kepala sekolah memandang hambatan pendidikan sebagai

akibat inheren dari kecacatan siswa. Pandangan ini menempatkan siswa sebagai objek yang harus "disembuhkan" atau disesuaikan agar cocok dengan sistem sekolah yang kaku.

Melalui intervensi pelatihan yang menekankan pada Teori Konstruksi Sosial, terjadi pergeseran pemahaman filosofis yang fundamental. Data evaluasi menunjukkan peningkatan kategori pemahaman dari level Kurang menjadi Baik. Mitra kini menginternalisasi Model Sosial Disabilitas, yang memandang bahwa disabilitas bukanlah penghalang utama, melainkan hambatan yang diciptakan oleh lingkungan, sikap negatif, dan sistem yang tidak akomodatif.

Perubahan paradigma ini sejalan dengan pandangan Cahyono & Ningsih (2023), yang menegaskan bahwa peran kepala sekolah sebagai agen konstruksi sosial sangat krusial dalam mereduksi stigma dan membentuk budaya sekolah yang inklusif. Kepala sekolah kini memahami bahwa tanggung jawab utama mereka adalah menghilangkan hambatan struktural (*barrier removal*) di lingkungan sekolah, bukan menuntut perubahan pada diri anak. Transformasi ini juga merefleksikan implementasi Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner, di mana perubahan pada mikrosistem sekolah (sikap kepala sekolah dan guru) merupakan prasyarat mutlak bagi perkembangan optimal peserta didik berkebutuhan khusus (Harahap & Siregar, 2019).

## 2. Peningkatan Kompetensi Perumusan Tujuan Pembelajaran (PPI)

Keberhasilan rekonstruksi sosial menjadi landasan kuat bagi peningkatan kompetensi teknis. Pada aspek manajerial, khususnya dalam kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran melalui Program Pembelajaran Individual (PPI), terjadi lonjakan kompetensi dari kategori 'Cukup' menjadi 'Sangat Baik'.

PPI seringkali dipandang sebagai beban administratif semata atau dokumen pelengkap yang tidak fungsional. Namun, pelatihan yang berorientasi aksi (*action-oriented*) berhasil membekali kepala sekolah dengan keterampilan untuk menyusun PPI yang berbasis asesmen fungsional. Mitra kini mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan unik setiap peserta didik.

Peningkatan kompetensi ini memvalidasi temuan Dewi & Susanto (2022), yang menyatakan bahwa manajemen sumber daya sekolah yang strategis termasuk kompetensi kepala sekolah dalam memimpin penyusunan PPI adalah kunci keberhasilan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Selain itu, kemampuan kepala sekolah dalam mendorong guru melakukan diferensiasi kurikulum juga meningkat, sejalan dengan prinsip bahwa evaluasi program pelatihan guru harus berdampak langsung pada kompetensi diferensiasi pembelajaran di kelas (Fitriani & Wijaya, 2021).

### 3.5 Ketercapaian Tujuan Program

Secara ilmiah, ketercapaian tujuan program ini diukur melalui evaluasi komparatif menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang mengukur dua variabel dependen utama: pemahaman filosofis (konstruksi sosial) dan kompetensi manajerial. Program ini berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu mentransformasi paradigma kepala sekolah dari Model Medis ke Model Sosial Disabilitas. Berdasarkan analisis data, terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman filosofis mitra dari kategori kualitatif 'Kurang' menjadi 'Baik'. Ketercapaian ini mengindikasikan keberhasilan internalisasi konsep bahwa hambatan pendidikan inklusif bukan terletak pada defisit individu siswa, melainkan pada hambatan sistemik lingkungan sekolah, sebagaimana dijelaskan dalam teori konstruksi sosial.

Tujuan peningkatan kapasitas teknis juga tercapai dengan sangat baik. Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) dan Rencana Aksi Sekolah Inklusif (RASI) meningkat dari kategori 'Cukup' menjadi 'Sangat Baik'. Hal ini membuktikan efektivitas metode *workshop* partisipatif dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi (Permendiknas No. 70 Tahun 2009) dan praktik operasional di lapangan.

### 3.6 Dampak Program

Dampak program dievaluasi berdasarkan perubahan peran dan *output* kebijakan yang dihasilkan oleh mitra. Dampak paling fundamental adalah terjadinya transformasi peran kepala sekolah dari administrator pasif menjadi agen konstruksi sosial yang proaktif.

Dalam perspektif sosiologis, program ini berdampak pada terbentuknya budaya sekolah baru yang lebih inklusif. Kepala sekolah kini mampu memimpin pengurangan stigma dan diskriminasi melalui kebijakan anti-*bullying*, yang sejalan dengan temuan Cahyono & Ningsih (2023) mengenai peran vital kepala sekolah dalam merekonstruksi nilai sosial di lingkungan pendidikan dasar.

Dampak manajerial terlihat dari kemampuan sekolah dalam manajemen sumber daya. Mitra kini memiliki dokumen RASI sebagai panduan strategis dalam mengalokasikan anggaran BOS untuk kebutuhan inklusi dan memberdayakan guru kelas reguler untuk melakukan diferensiasi pembelajaran. Peningkatan kompetensi ini berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), memvalidasi teori bahwa manajemen sumber daya yang efektif adalah prasyarat keberhasilan PPI (Dewi & Susanto, 2022).

### 3.7 Strategi Keberlanjutan Program

Untuk menjamin bahwa dampak program bersifat jangka panjang (*sustainable*), strategi keberlanjutan disusun berdasarkan pendekatan sistemik Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner. Strategi ini memastikan intervensi tidak berhenti pada level individu kepala sekolah, tetapi meluas ke ekosistem sekolah.

1. Keberlanjutan dijamin melalui implementasi dokumen Rencana Aksi Sekolah Inklusif (RASI) yang telah disusun oleh setiap mitra. Dokumen ini berfungsi sebagai *blueprint* kebijakan sekolah yang mengikat komitmen warga sekolah terhadap praktik inklusif.
2. Penguatan Kapasitas Internal (In-House Training) untuk Mengatasi ketiadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), strategi keberlanjutan difokuskan pada pemberdayaan guru kelas melalui pelatihan internal (*In-House Training*) tentang pembelajaran terdiferensiasi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa kompetensi guru harus terus ditingkatkan untuk melayani keberagaman (Fitriani & Wijaya, 2021).
3. Program ini menanamkan model kepemimpinan transformatif, di mana kepala sekolah didorong untuk terus membangun budaya kolaboratif dan jejaring kerja (*networking*) antar-sekolah di Kecamatan Bantaeng (Baswedan & Hidayat, 2025). Jejaring ini akan berfungsi sebagai wadah berbagi praktik baik (*best practices*) untuk memecahkan masalah secara kolektif di masa depan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan program pengabdian masyarakat dapat ditarik beberapa kesimpulan utama terkait transformasi pendidikan inklusif di Kecamatan Bantaeng:

1. Transformasi Konstruksi Sosial Berhasil program ini terbukti sangat efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menggeser konstruksi sosial dan paradigma filosofis Kepala Sekolah. Hal ini didukung oleh analisis *gap* di mana skor pemahaman filosofis mitra meningkat secara signifikan, berpindah dari kategori 'Kurang' menjadi 'Baik'. Kepala Sekolah kini memahami inklusi sebagai tugas menghilangkan hambatan sistem (Model Sosial Disabilitas), bukan sekadar penempatan fisik siswa.
2. Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Prosedural Selain perubahan *mindset*, kompetensi manajerial Kepala Sekolah meningkat tajam, mencapai kategori 'Sangat Baik'. Kenaikan ini menegaskan bahwa workshop praktis berhasil membekali mitra dengan keterampilan esensial untuk mengelola program inklusif, termasuk penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI), perencanaan alokasi dana BOS, dan perumusan Rencana Aksi Sekolah Inklusif (RASI) yang terukur.
3. Kesiapan Implementasi dan Keberlanjutan: Kepala Sekolah telah beralih dari fase pasif menjadi agen perubahan yang proaktif. Dengan adanya komitmen budaya dan dokumen RASI

yang telah disusun, fondasi yang kuat untuk implementasi program inklusif yang berkelanjutan telah terbentuk di sekolah-sekolah sasaran, menjamin bahwa keberlanjutan inklusi tidak lagi tergantung pada tim pengabdian.

## B. Saran

Saran-saran yang diajukan untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas implementasi pendidikan inklusif:

### 1. Saran untuk Kepala Sekolah

- Implementasi RASI Secara Konsisten bahwa kepala Sekolah disarankan untuk melaksanakan RASI yang telah disusun sebagai prioritas utama dan memonitor pelaksanaannya secara triwulanan. Pastikan RASI tidak hanya menjadi dokumen, tetapi menjadi peta jalan aksi yang hidup.
- Penguatan Guru (In-House Training) bahwa Kepala Sekolah harus segera menindaklanjuti dengan mengadakan pelatihan internal (*in-house training*) bagi seluruh guru kelas, berfokus pada keterampilan diferensiasi. Kompetensi yang telah didapat harus ditularkan kepada seluruh staf.
- Pengaktifan Kemitraan Orang Tua membangun komunikasi yang terstruktur dengan orang tua ABK untuk menyusun dan mengevaluasi PPI secara bersama-sama, menjadikan orang tua sebagai mitra kunci dalam keberhasilan pendidikan anak.

### 2. Saran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng

- Legalisasi dan Dukungan RASI bahwa Dinas Pendidikan disarankan untuk mengadopsi dan mendukung RASI yang telah disusun oleh Kepala Sekolah sebagai dokumen perencanaan wajib bagi sekolah inklusif, memberikan legitimasi dan dukungan anggaran pada prioritas yang tercantum di dalamnya.
- Alokasi Sumber Daya Manusia: Perlu dipertimbangkan alokasi dan pemerataan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di Kecamatan Bantaeng atau setidaknya mendukung pembentukan Koordinator/Tim Sumber Daya Inklusi di setiap gugus sekolah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui Program Kemitraan Masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kepala sekolah SD se Kecamatan Bantaen, yang telah berpartisipasi aktif dalam program ini, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Banteng yang telah memberikan dukungan kebijakan untuk keberlanjutan program.

## REFERENSI

- Baswedan, A. R., & Hidayat, M. (2025). *Kepemimpinan Transformatif untuk Sekolah Inklusif: Mengubah Budaya Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala Ilmu.
- Cahyono, D., & Ningsih, R. A. (2023). Peran Kepala Sekolah Sebagai Agen Konstruksi Sosial: Studi Kasus Pengurangan Stigma di Sekolah Dasar. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 8(2), 112-130
- Dewi, K. P., & Susanto, T. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Sekolah dalam Mendukung Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(4), 501-515
- Dewi, K. P., & Susanto, T. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Sekolah dalam Mendukung Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(4), 501-515.
- Fitriani, L., & Wijaya, I. (2021). Evaluasi Program Pelatihan Guru terhadap Kompetensi Diferensiasi Pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 15(3), 200-215.

- Fitriani, L., & Wijaya, I. (2021). Evaluasi Program Pelatihan Guru terhadap Kompetensi Diferensiasi Pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 15(3), 200-215.
- Harahap, F., & Siregar, M. A. (2019). Integrasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Perencanaan Program Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 10(1), 1-15.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Masa Pandemi dan Pascapandemi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa*. Jakarta: Kemendiknas.
- Kusuma, R. S. (2018). *Implikasi Teori Konstruksi Sosial terhadap Implementasi Kurikulum Inklusif di Asia Tenggara*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2023. (2023). *Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan Dasar*. Jakarta: Kemendikbudristek.